

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Salah satu era penting dalam sejarah Jepang adalah era Meiji pada tahun (1868-1912) ini merupakan era dimana struktur masyarakat Jepang berubah secara drastis, yaitu dari masyarakat feodal menjadi masyarakat dengan struktur modern. Shogun tidak lagi menjadi pemimpin militer tertinggi serta pemimpin tertinggi negara. Kekuasaan dan kewenangan *shogun* dikembalikan kepada kaisar. Kemudian, sistem tuan tanah (*daimyo*) dan

Wilayah (*han*) yang terjadi ciri utama feodalisme juga dihapuskan, sehingga tanah dan masyarakat secara resmi berada dibawah kewenangan kaisar. Di kemudian hari, *han* diubah menjadi prefektur dan banyak *daimyo* menjadi gubernur. Selain itu, sebagai penanda era yang baru, ibukota Jepang yang sejak tahun 794 adalah kyouto dipindahkan ke tokyo ( nama baru untuk Edo ).

Tidak hanya itu, memasuki era yang baru, pemerintahan Meiji menghapus kebijakan negara tertutup (*sakoku*) yang telah dilaksanakan selama zaman Edo (1603–1868). Sebelum era Meiji, Jepang memang menjalin hubungan dengan negara barat seperti Belanda, tetapi hubungan tersebut hanya terbatas dibidang medis (Jepang banyak mempelajari pengobatan medis modern dari Belanda) dan perdagangan. Hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dimulai ketika Komodor Matthew C. Perry datang ke

Jepang lewat pelabuhan Urawa di tahun 1853 dan mendesak Jepang untuk membuka negaranya kepada dunia. Penghapusan kebijakan *sakoku* ini akhirnya dapat tercapai sebelum era Meiji. Dengan ini, Jepang mulai lebih dari berharap negara barat seperti Amerika Serikat dan negara –negara Eropa. Pemerintah bergeser jauh dari kebijakan yang berorientasi barat pada tahun 1874, ketika gerakan hak populer, seperti *seitoshu*, *shin fujin kyokai* terbentuk, orang – orang mulai menyerukan pembentukan sebuah dewan nasional.

Abad kedua puluh telah melihat sebuah revolusi di seluruh dunia dalam perpanjangan hak berpendidikan untuk perempuan. Pandangan masyarakat Jepang sejauh mana hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di semua tingkatan diterima di dalam hukum yang bervariasi. Tidak ada bangsa yang perempuan sepenuhnya terwakili ditingkat elit yang sebanding dengan jumlah mereka dalam populasi. Sementara itu, di banyak negara, hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan sangatlah rendah, seperti voting, menghadiri pertemuan–pertemuan pendidikan atau mendiskusikan hal tentang pendidikan, masih tidak diperbolehkan, seperti yang dibuktikan oleh perbedaan yang besar antara jumlah pemilih untuk pria dan wanita dan dengan data survei menunjukkan sebagian besar dari penduduk di kebanyakan negara masih belum pasti tentang apakah wanita termasuk dalam kehidupan pendidikan.

Pandangan wanita Jepang tentang tempat mereka dalam kehidupan pendidikan telah mengalami perubahan besar. Wanita memperoleh hak – hak dalam pendidikan penuh dalam arti hukum pada tahun 1945, sebagai hasil dari

kekalahan Jepang di perang dunia ke dua dengan tekanan dari pihak Amerika Serikat, masa pendudukan yang berlangsung selama 7 tahun (1945 – 1952) telah memberikan perubahan, dari mulai reformasi tanah dengan sistem feodalisme sampai dengan masalah hak pilih wanita. Sebelum waktu itu, partisipasi mereka dalam pendidikan telah sangat terbatas. Untuk sebagian besar periode sebelum perang, tidak banyak pendidikan yang dilarang, tetapi wanita secara hukum dilarang untuk partisipasi pendidikan selama era ketika perempuan masyarakat barat mendapatkan hak – hak pendidikan penuh, gerakan hak pilih perempuan terbentuk di Jepang pada awal dekade abad kedua puluh, pada saat itu dukungannya sangat terbatas oleh karena itu mereka meningkatkan efek kesadaran pada kaum wanita di beberapa negara-negara barat. Warisan tertentu Jepang dimasa lalu, dikombinasikan dengan keadaan unik sekitar pengenalan hak bagi pandangan wanita pada tahun 1945, memiliki konsekuensi besar bagi pandangan wanita Jepang pada peranan pendidikan dan pilihan di masa pasca perang melalui masa kini.

Ketika Jepang mulai terburu-buru untuk memoderinisasi pada tahun 1968, negara itu muncul dari hampir tujuh abad feodalisme yang dipimpin oleh kelas prajurit laki – laki, yaitu bernama samurai. Sedangkan negara – negara barat, selama periode yang sama telah menghasilkan segelintir ratu yang terkuat, seperti Elizabeth I, Mary, ratu Jadwiga dari Polandia, pantheon Jepang dari para pemimpin pendidikan. Pada periode Tokugawa (1603- 1867), kebijakan pemerintah pusat mengharuskan laki- laki elit dengan perang pendidikan nasional untuk bermain meninggalkan keluarga mereka di provinsi

ketika mereka datang ke ibukota menangani urusan pendidikan. Mengapa banyak perempuan tetap terbatas dalam pendidikan, meskipun jaminan hukum telah menjadi subyek banyak penelitian baru. Hal yang paling komprehensif yang muncul dalam bentuk outline dari kerja yang dilakukan sampai saat ini mengacu pada teori pembelajaran sosial dan menyatakan bahwa partisipasi pendidikan melibatkan peran seperti orang lain, dan bisa dipelajari. Untuk wanita yang dihadapkan dengan pilihan untuk menjadi aktif secara pendidikan itu merupakan tugas yang paling mudah. Ada konflik yang berhubungan erat antara norma – norma dan harapan yang terkait dengan peran jenis kelamin perempuan, seperti yang didefinisikan dalam suara masyarakat modern dan norma – norma dan harapan yang terkait dengan peranan pendidikan. Kurang dari satu abad yang lalu pendidikan lebih laki- laki dalam semua masyarakat utama, sehingga peran laki- laki merupakan definisi peran pendidikan.

Hak pilih perempuan menjadi masalah pada awal 1876 disalah satu mejelis yang baru didirikan Jepang. Pada tahun 1887 undang – undang yang dibuat membatasi hak – hak perempuan. Perempuan tidak memiliki suara, (hak pilih universal bagi laki – laki datang pada tahun 1924) dan mereka masih menderita dari sisa – sisa budaya samurai yang membuat mereka tunduk kepada suami mereka. Mereka tidak bisa menceraikan suami mereka, sementara mereka tunduk atas perceraian oleh suami mereka. Seorang wanita memiliki sangat sedikit hak–hak hukum. Pandangan wanita Jepang perubahan atas kedudukan dan perannya dalam kehidupan pendidikan telah mengalami

perubahan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pada tahun 1968-1912, sebuah organisasi pendidikan wanita pertama yang disebut dengan *shin fujin kyokai* yang dibentuk untuk menyuarakan hak – hak politik wanita, kemudian wanita diperbolehkan mengikuti organisasi – organisasi pendidikan meskipun mereka tetap tidak memiliki hak pilih sampai tahun 1946. Salah satu tokoh perempuannya adalah *Mori Arinori*. *Mori Arinori* adalah pelopor hak- hak perempuan Jepang yang diatur oleh gerakan buruh perempuan antara perang dunia kedua, tetap aktif secara pendidikan sampai kematian pada usia enam puluh tiga tahun tutup usia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul “peranan Mori Arinori dalam feminisme di Jepang “. Skripsi ini akan berfokus kepada mengenai seberapa jauh usaha Mori Arinori dalam memperbaiki status perempuan dalam masyarakat Jepang tentang hal dalam kegiatan organisasi dan pendidikan.

## **B. Rumusan dan fokus masalah**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka, indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perjuangan Mori Arinori untuk bisa mendapatkan hak suara perempuan di Jepang?
- b. Bagaimana peranan Mori Arinori organisasi dalam pendidikan feminisme di Jepang tahun 1872-1969?

## 2. Fokus masalah

- a. Hal perjuangan Mori Arinori untuk bisa mendapatkan hak suara perempuan di Jepang.
- b. Pengaruh Mori Arinori berorganisasi dalam pendidikan feminisme di Jepang.

## 3. Tujuan dan manfaat penelitian

- a. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan sesuai dengan masalah, maka yang terjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perjuangan Mori Arinori untuk bisa mendapatkan hak suara perempuan di Jepang.
- 2) Untuk mengetahui Peranan Mori Arinori berorganisasi dalam pendidikan feminisme di Jepang.

- b. Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Untuk penulis, agar dapat mengamati perjuang Mori Arinori untuk bisa mendapatkan hak suara perempuan.
- 2) Untuk membaca, agar dapat menambah wawasan pengaruh Mori Arinori berorganisasi dalam pendidikan feminisme di Jepang.

## 4. Definisi operasional

- a. Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peranan mempunyai arti sebagai berikut:

“peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan dalam suatu peristiwa” (kamus besar bahasa indonesia, 2018: 1173).

Menurut soejono soekanto (2002, p.243 ) peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi sesuatu peristiwa.

b. Feminisme

Menurut kamus besar indonesia, feminisme mempunyai arti sebagai berikut:

“gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria” (kamus besar bahasa indonesia, 2018, 463).

Menurut mansour faqih dalam heldianto (2015: 99 ), disebutkan feminisme adalah suatu gerakan yang berangkat dari asurnsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan diespolitasi, serta ada upaya mengakhiri penindasan dan pengekplotasian tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan haknya agar setara dan tidak dianggap sebelah mata oleh kaum laki-laki.

### **C. Sistem penulisan**

Sistem penulisan ini terdiri dari lima bab yang menjelaskan sub-sub setiap bab, adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bab I. Berisi terdiri dari pendahuluan pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan dan focus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematis penulisan. Bab II. Memaparkan landasan teoretis, pada bab ini penulisan menjelaskan mengenai teori- teori yang relevan mengenai uraian kedudukan wanita Jepang dalam pendidikan. Bab III. Metodologi penelitian, pada bab ini akan menerangkan tentang jenis metodologi penelitian, dengan metodologi pustaka sejarah dan melalui pengumpulan data melalui revensi buku, e-book dan internet. Bab IV. Berisi alisis data, bab ini membahas menutup yang berisi kesimpulan mau pun saran dan tujuan penelitian dan dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dari permasalahan yang telah dikemukakan dari awal. Bab V. Merupakan kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis menjelaskan mengensi kesimpulan dari semua pembahasan hasil dari anilisis yang telah dilakukan dan saran – saran yang berkaitan dengan hasil analisis untuk para pembaca.